BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Untuk mempelajari *idiosyncratic* Susilo Bambang Yudhoyono, maka perlu menganalisis kepribadiannya baik dari segi profil, karir politik hingga kebijakan-kebijakan selama ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dari aspek-aspek tersebut akan terlihat bagaimana *idiosyncratic* dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dari *idiosyncratic* tersebut akan mempengaruhi segala tindakan ataupun keputusan yang akan dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia. Dari tipe kepribadian dan karakter Presiden menurut para pakar yang telah peneliti analisis dalam teori *idiosyncratic*. Terdapat juga berbagai kelebihan dan kekurangan dalam karakter kepribadian *active independent* yang dimiliki oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri yang dilakukannya.
2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke enam Republik Indonesia serta Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam penyelesaian permasalahan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri, dalam hal ini lebih khusus terhadap para TKI di Malaysia, Presiden Yudhoyono mengeluarkan beberapa kebijakan dalam perlindungan

terhadap para TKI di Malaysia yang diharapkan dapat melindungi para TKI tersebut. Kebijakan yang di buat oleh Presiden Yudhoyono tersebut meliputi berbagai kebijakan baik sebelum keberangkatan para TKI ke Malaysia maupun saat bekerja di Malaysia. Presiden Yudhoyono juga mengeluarkan moratorium keberangkatan TKI ke Malaysia melalui KEMENAKERTRANS. Untuk para TKI yang sedang menghadapi permasalahan hukum di Malaysia, Presiden Yudhoyono membentuk Satgas perlindungan TKI guna membantu permasalahan hukum yang sedang di hadapi oleh para TKI tersebut. Terdapat juga beberapa kebijakan lain menyangkut upaya penyelesaian permasalahan TKI di Malaysia yaitu Inpres No. 6/2006 mengenai kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI serta Inpresn No.81 tahun 2006 mengenai pembentukan BNP2TKI di luar negeri.

3. Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam tipe kepribadian *active independent* dengan ciri-ciri: *High Nasioanlism* yaitu individu yang berkarakter nasionalis yang mempunyai kehendak yang kuat untuk memelihara kedaulatan dan integrasi negaranya, *High Believe in Own Control* yaitu memiliki tingkat inisiatif yang tinggi, *High Conceptual Complexity* yaitu memiliki kemampuan dalam menyadari adanya bebarapa alternatif pilihan pembuatan keputusan, *Low Distrust Of Others* yaitu memiliki keperayaan yang rendah terhadap pihak lain, *High Need For Affiliation* yaitu individu yang mementingkan arti hubungan pertemanan, *Low Need For Power* yaitu

mempunyai keinginan untuk control yang besar. Faktor *idiosyncratic* Presiden Yudhoyono yang *active independent* tersebut yang mempengaruhi pengambilan berbagai kebijakan terhadap penyelesaian permasalah TKI di Malaysia.

4. Sejarah panjang hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara bertetangga yang terkadang sedikit memanas dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Termasuk juga mengenai penyelesaian permasalahan terhadap para TKI yang bekerja di Malaysia. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan politik luar negeri Presiden Yudhoyono yang mengedepankan jalur diplomasi dalam penyelesaian permasalahan TKI. Hal ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Malaysia kedepannya. Mengingat Indonesia dan Malaysia termasuk dua negara yang menjadi pilar penting kawasan ASEAN.

5.2 Saran

1. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyelesaian permasalahan terhadap TKI yang bekerja di Malaysia hendaknya mampu menciptakan keadaan yang nyaman bagi TKI untuk bekerja di Malaysia dan diharapkan pula kejadian tindak kekerasan yang sering menimpa para TKI terutama para tenaga kerja wanita yang

bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga tidak lagi terulang. Dan juga bekerjasama dengan pihak pemerintah Malaysia untuk memberikan kenyamanan para TKI bekerja di Malaysia.

2. Peran departemen pemerintah serta lembaga negara terkait seperti Kementrian Luar Negeri dan BNP2TKI lebih di tingatkan dalam upaya menjalankan berbagai kebijakan yang melindungi para TKI di luar negeri, dan juga harus lebih cepat tanggap dalam mencari solusi bagi permasalahan para TKI.
3. Tetap menjaga hubungan baik antara dua negara bertetangga Indonesia dan Malaysia serta menjalin komunikasi yang lebih intensif dalam hal penyelesaian permasalahan mengenai para TKI di Malaysia, sehingga berbagai kasus tindak kekerasan serta perdagangan orang dapat diminimalisir.
4. Membuat pembaharuan berbagai *Memorandum of Understanding* (MoU), sehingga dua belah pihak baik pekerja dan majikan tidak merasa dirugikan. Juga lembaga negara seperti BNP2TKI lebih aktif dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban para TKI, sehingga para TKI diharapkan mampu memahami apa hak dan kewajiaban mereka sebagai TKI.